



**BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 0021/WP 00/I/2026 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT BADAN

PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat Tahun 2026 yang berisi uraian dan jenis kegiatan pengawasan, sasaran pengawasan, jadwal dan keluaran (output);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis
Risiko Inspektorat Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);
 - g. Keputusan Ketua Umum DPN AAIPi Nomor KEP-059/AAIPi/DPN/2018 Tanggal 09 Oktober 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
 - h. Keputusan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1878/INSP/X/2020

Tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko Inspektorat BAPETEN.

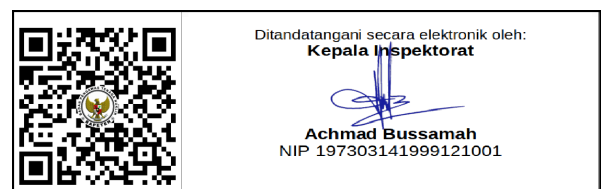
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2026, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Kepala INSPEKTORAT Badan Pengawas
Tenaga Nuklir ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Januari 2026

Kepala Inspektorat



Achmad Bussamah

NIP. 197303141999121001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR**

NOMOR : 0021/WP 00/I/2026 TAHUN 2026

TANGGAL : 08 Januari 2026

**TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2026**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik KKN, diperlukan pengawasan, utamanya pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Inspektorat BAPETEN sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal, yang merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang penting dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah BAPETEN telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam RPJMN, Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Inspektorat BAPETEN mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sehingga memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat diharapkan menjadi *early warning* segala

bentuk penyimpangan yang terjadi, terlebih lagi penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, APIP harus didukung oleh sistem dan metodologi yang berintegrasi, dijalankan dengan konsisten, sehingga kredibilitas APIP akan terbangun.

Tugas dan fungsi Inspektorat diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir :

1. Tugas

Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BAPETEN.

2. Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja kepegawaian dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Hal yang tidak kalah pentingnya, APIP harus selalu meningkatkan kemampuan para auditornya. Tidak hanya kemampuan dalam bidang pengawasan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman yang baik atas tata kelola dan proses bisnis pada auditinya.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan intern, maka setiap tahunnya perlu disusun Program Kerja Pengawasan yang berisi tentang pokok-pokok pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat yang disusun dalam Program Kerja yang berisi tentang pokok-pokok pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat yang disusun dalam Program Kerja yang berisi tentang pokok-pokok pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat yang disusun dengan berbasis risiko yang ada dalam organisasi sebagai dasar dalam penyusunan program kerja selama setahun atau disebut sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-059/AAIPI/DPN/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
10. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Badan Pengawas Tenaga Nuklir Perubahan kedua tanggal 08 Januari 2025.
11. Surat Keputusan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1878/INSP/X/2020 Tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Inspektorat BAPETEN.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat Bapeten Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Memberikan panduan dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko prioritas lembaga;
2. Membantu meningkatkan efektivitas audit melalui penetapan berbagai aspek dari suatu audit antara lain unit yang perlu diaudit, siapa auditornya, waktu yang diperlukan, dan kapan dilaksanakan;
3. Memungkinkan auditor mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki (menyesuaikan beban kerja dan sumber daya);
4. Memfokuskan diri pada bidang yang kritis/menjadi prioritas;
5. Memilih instrumen, metode, dan prosedur audit yang paling tepat dan efisien;
6. Menyelaraskan rencana kegiatan pengawasan intern Tahun Anggaran 2026 seluruh objek pemeriksaan dan menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan dengan Aparat Pengawasan Eksternal; dan
7. Menunjukkan Inspektorat mampu bekerja sesuai standar profesional.

Sasaran yang akan diwujudkan dari pelaksanaan PKPT Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Terselenggaranya pengawasan intern, termasuk didalamnya kegiatan penguatan dan pengembangan pengawasan secara efisien, efektif dan ekonomis; dan
2. Mendorong peningkatan kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

D.KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Kewenangan

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja dan unit kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BAPETEN serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BAPETEN dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

2. Tanggung Jawab

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan BAPETEN.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN OBJEK PENGAWASAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Inspektorat dipimpin oleh Kepala Inspektorat dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagai berikut :



B. SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT UTAMA

Jumlah pegawai Inspektorat berdasarkan golongan dan Jabatan adalah sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Inspektorat/Inspektur	1	-	-	-	1
2	Pengendali Mutu /Auditor	1	-	-	-	1
3	Pengendali Teknis/Auditor	3	-	-	-	3
4	Ketua Tim/Auditor	-	2	-	-	2
5	Anggota/Auditor	-	4	-	-	4
6	Kasubbag Tata Usaha	-	1	-	-	1
7	Staff Tata Usaha	-	1	-	-	1

C. ANGGARAN

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, pada lampiran dari surat

tersebut alokasi anggaran BAPETEN Tahun 2026 pada Program Dukungan Manajemen di kegiatan non operasional tidak diberikan alokasi anggaran oleh pemerintah.

BAB III

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026

A. PENYUSUNAN PKPTBR BERBASIS RISIKO

Pertimbangan manajemen dalam penerapan pengawasan berbasis risiko Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat telah menetapkan faktor pertimbangan manajemen yang selaras dengan kebijakan Lembaga. Faktor pertimbangan manajemen diformulasikan sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Auditi;
- b. Arahkan Pimpinan;
- c. Nilai Paket Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- d. Nilai paket pengadaan Belanja barang perjalanan dinas (MAK 524...);
- e. Potensi terjadinya fraud;
- f. Zona Integritas;
- g. Jenis penugasan;
- h. SDM Auditor JFA Inspektorat;
- i. Jumlah temuan audit internal;
- j. Jumlah temuan audit eksternal;
- k. Nilai evaluasi SAKIP Satker;
- l. Kepatuhan auditi terhadap TLHA;
- m. Kepatuhan auditi terhadap TLHP;
- n. Realisasi Anggaran Unit Kerja;
- o. Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Bapeten;
- p. Survei Penilaian Integritas oleh KPK;
- q. Aduan yang masuk melalui WBS dan LAPOR.

Faktor pertimbangan manajemen sekurang-kurangnya memperhitungkan kriteria sebagai berikut :

No	Faktor Pertimbangan Manajemen	Kriteria	Nilai
1	Jumlah Anggaran Auditi	Di atas 3M	5
		Di atas 1M sampai dengan 3M	3

No	Faktor Pertimbangan Manajemen	Kriteria	Nilai
		Sampai dengan 1M	1
2	Arahan Pimpinan	Hasil tinjauan manajemen	5
		Permintaan pengawasan oleh pimpinan	3
		Hasil Rapat Pimpinan	1
3	Nilai paket pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan barang di atas 200 Juta	5
		Pengadaan barang 101 - 200 Juta	3
		Pengadaan barang 0 sampai dengan 100 Juta	1
4	Nilai paket pengadaan Belanja barang perjalanan dinas (524...)	Pengadaan barang perjalanan dinas diatas 1M	5
		Pengadaan barang perjalanan dinas 500 Juta – 1M	3
		Pengadaan barang perjalanan dinas dibawah 500 Juta	1
5	Potensi terjadinya fraud	Berdasarkan tugas dan fungsi, sangat berpotensi terjadinya fraud	5
		Berdasarkan tugas dan fungsi, cukup berpotensi terjadinya fraud	3
		Berdasarkan tugas dan fungsi, tidak berpotensi terjadinya fraud	1
6	Zona Integritas	Belum memperoleh predikat WBBM/WBK	5
		Memperoleh predikat WBK	3
		Memperoleh predikat WBBM	1
7	Jenis penugasan	Penugasan mandatory (peraturan perundangan)	5
		Penugasan non mandatory	3
8	SDM Auditor JFA Inspektorat	Auditor jumlahnya memadai (27 orang)	5
		Auditor jumlahnya tidak memadai (kurang dari 27 orang)	1
9	Jumlah temuan audit internal	Temuan material dan berulang lebih dari 3	5
		Temuan material dan berulang sampai dengan 3	1
10	Jumlah temuan audit eksternal	Temuan terkait pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundangan yang material (kerugian negara)	5
		Temuan terkait pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundangan (SOP, administrasi)	3

No	Faktor Pertimbangan Manajemen	Kriteria	Nilai
		Management letter (surat teguran)	1
11	Nilai evaluasi SAKIP Satker	Nilai SAKIP Satker di bawah 70	5
		Nilai SAKIP Satker di atas 70	3
12	Kepatuhan auditi terhadap TLHA	Ditindaklanjuti di bawah 100%	5
		Ditindaklanjuti 100%	1
13	Kepatuhan auditi terhadap TLHP	Ditindaklanjuti di bawah 100%	5
		Ditindaklanjuti 100%	1
14	Realisasi Anggaran Unit Kerja	Sampai dengan 97%	5
		Di atas 97%	1
15	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Bapeten	Mutu Pelayanan sampai dengan B (skala A-D)	5
		Mutu Pelayanan di atas B (skala A-D)	1
16	Survei Penilaian Integritas oleh KPK	Sampai dengan nilai 50	5
		Di atas nilai 50	1
17	Aduan yang masuk melalui WBS dan LAPOR	Adanya pengaduan dan tidak ditindaklanjuti	5
		Adanya pengaduan dan ditindaklanjuti	3
		Tidak ada pengaduan	1
18	Stakeholders telah dilakukan pengawasan oleh Stakeholders lainnya	Telah dilakukan pengawasan oleh Stakeholders lainnya	5
		Belum dilakukan pengawasan oleh Stakeholders lainnya	1

B. PKPTBR TAHUN ANGGARAN 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 11 mengatur bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, pengawasan intern yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan, akan tetapi juga harus mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan/pelanggaran yang akan terjadi dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih, serta mampu merespon setiap permasalahan atau dinamika yang mungkin terjadi pada organisasi.

Berdasarkan faktor Pertimbangan Manajemen dan perhitungan prioritas risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2026 terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam lampiran PKPTBR ini.

C. KERJA SAMA PENGAWASAN INTERN

Untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan pengawasan intern :

a. Kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Ruang Lingkup kerja sama dengan BPK RI meliputi :

Kerja sama dengan BPK RI dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Badan Pengawas Tenaga Nuklir, meliputi :

1. Pendampingan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK RI di Badan Pengawas Tenaga Nuklir dilaksanakan pada daftar PKPTBR

dalam bentuk kegiatan Pendampingan terhadap pemeriksaan Eksternal;

2. Verifikasi atas bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebelum disampaikan oleh Unit Kerja ke Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2026.

b. Kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Ruang Lingkup kerja sama dengan BPKP meliputi :

1. Pelaksanaan pengawasan intern pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Evaluasi Disiplin Belanja, dan Reviu P3DN pada pengadaan 2025;
2. Pelaksanaan peningkatan level Internal Audit Capability Model (IACM) dan Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2026 dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2026 oleh Manajemen BAPETEN;
3. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja serta Disiplin Kerja SDM Inspektorat; dan
4. Kegiatan lain yang meliputi pengawasan pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang Terintegrasi dan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi/Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders.

c. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Ruang Lingkup kerja sama dengan KPK RI meliputi :

1. Pencegahan tindak pidana korupsi pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pemantauan atas Survey Penilaian Integritas Tahun 2026 oleh KPK;
2. Sistem penanganan pengaduan pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM II 2025 dan SM I 2026;
3. Kerja sama lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kondisi dan kebutuhan.

d. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya

Kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kondisi dan kebutuhan.

e. Kerja sama Pengembangan Pengawasan Intern melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Berupa kegiatan telaah sejawat, sosialisasi, bimbingan teknis dan lainnya pada daftar kegiatan PKPTBR dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi/Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders.

D. RINCIAN KEGIATAN PKPTBR TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan PKPTBR Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Inspektorat ditampilkan dalam matriks yang memuat :

1. Nama Kegiatan;
2. Ruang Lingkup Pengawasan;
3. Objek Pengawasan;
4. Pengendali Teknis;
5. Ketua Tim;
6. Anggota Tim;
7. Jumlah Orang;
8. Jumlah Hari;
9. Jumlah LHP;
10. Waktu Pelaksanaan;
11. Komponen Personil Tim.

Rincian kegiatan PKPTBR Tahun Anggaran 2026 terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam lampiran PKPTBR ini.

E. TARGET JUMLAH LAPORAN

Hasil dari pelaksanaan PKPT ini berupa Laporan sebanyak 66 Laporan, yaitu:

1. Laporan Hasil Audit sebanyak 6 laporan;
2. Laporan Hasil Reviu sebanyak 9 laporan;
3. Laporan Hasil Evaluasi sebanyak 16 laporan;
4. Laporan Hasil Pemantauan sebanyak 16 laporan;
5. Laporan Hasil Pengawasan lainnya sebanyak 19 laporan.

F. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat BAPETEN Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan internal di lingkungan BAPETEN

Jakarta, 08 Januari 2026

Mengesahkan,
Plt. Kepala BAPETEN

Kepala Inspektorat



#

LAMPIRAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT

Tabel 1 Rincian Kegiatan PKPT Tahun Anggaran 2026

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
I	AUDIT										
1	Audit atas Teknologi Informasi	Tahun 2026	BPIK	1	1	7	10	30	1	Oktober - Desember 2026	-
2	Audit ketaatan atas kegiatan Perawatan Gedung Kantor dan Sarana Gedung Kantor (3565.EBA.994.00 2.B dan C)	Tahun 2025	BOU dan BDL	1	1	3	6	30	1	Triwulan III-IV	-
3	Audit ketaatan atas kegiatan Perawatan Kendaraan	Tahun 2025	BOU	1	1	2	5	30	1	Triwulan III-IV	-

No .	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Bermotor Roda 2 4 dan 6 (3565.EBA.994.00 2.G)										
4	Audit ketaatan atas belanja pegawai : - tugas belajar - kenaikan pangkat - kenaikan jafung - kenaikan gaji berkala - kenaikan kelas dan jabatan - TBR - tunjangan status keluarga	Tahun 2026	BPIK dan BOU	1	1	3	6	30	1	Triwulan III- IV	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	- absensi kehadiran - laporan triwulan (SKP) - laporan harian										
5	Audit kinerja atas fungsi jaminan mutu ketenaganukliran	Tahun 2025	DKKN	1	1	3	6	30	1	Triwulan I, II, III dan IV	-
6	Audit ketaatan atas kegiatan pengadaan peralatan dan mesin (RDMS, RPM, APD, AC)	Tahun 2025	BOU	1	1	3	6	30	1	Triwulan III- IV	-
II	REVIU										
1	Reviu atas Laporan	Semester II Ta 2025;	BPIK dan BOU	1	1	3	6	20	1	Triwulan I, III dan IV	

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir	Semester I Ta 2026; Triwulan III Ta 2026									
2	Reviu atas Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK Tahun Anggaran 2025 BAPETEN	Semester II Ta 2025	BPIK dan BOU	1	1	3	6	20	1	Februari 2026	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
3	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN TA. 2025	Ta. 2025	Lembaga	1	1	1	4	20	1	Triwulan I	
4	Reviu RKA-K/L dan TOR/KAK serta RAB TA. 2027	Ta 2027	BPIK dan unit kerja	1	1	7	10	30	1	Triwulan III-IV	
5	Reviu RKBMN TA. 2028	Ta 2028	BOU	1	1	1	4	20	1	Oktober 2026	
6	Reviu Revisi Anggaran	Ta 2026	BPIK dan unit kerja	1	1	2	5	20	1	Januari – Desember 2026	
7	Reviu atas Pengelolaan PNBPN TA 2026	Ta 2026	BPIK dan unit kerja terkait	1	1	3	6	20	1	Triwulan II	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
III	EVALUASI										
1	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon I Tahun 2025 di lingkungan BAPETEN	Ta 2025	Satker dan BPIK	1	1	3	6	20	1	Triwulan III-IV	-
2	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tahun 2025	Unit kerja calon predikat WBK/WBB M	1	1	3	6	20	1	Triwulan III-IV	

No .	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	(SAKIP) Tingkat Eselon II Tahun 2025 calon penerima predikat WBK/WBBM di lingkungan BAPETEN										
3	Evaluasi Internal ex-ante dan On- going atas Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2026	Tahun 2026	BOU dan unit kerja terkait	1	1	1	4	20	1	Januari - Desember 2026	-
4	Evaluasi atas Efektivitas	Tahun 2026	Unit kerja	1	1	7	10	30	1	Juli dan Desember 2026	-

No .	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Penerapan Manajemen Risiko										
5	Evaluasi lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation/CEE) unit kerja tahun 2026	Tahun 2026	Unit kerja	1	1	3	6	30	1	April - Juni 2026	-
6	Evaluasi Disiplin Belanja	Tahun 2026	BPIK dan BOU	1	1	2	5	30	1	Triwulan I, II, III dan IV	
IV	PEMANTAUAN										
1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tahun 2026	Unit kerja	1	1	2	5	30	1	Triwulan I, II, III dan IV	-

No .	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Eksternal dan Internal										
2	Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan BAPETEN	Tahun 2026	Unit kerja	1	1	1	4	20	1	Februari - April 2026	-
3	Pengelolaan dan pengendalian Gratifikasi serta monitoring evaluasi Gratifikasi	Semester II Ta 2025; Semester I Ta 2026	Unit kerja	1	1	1	4	20	1	Januari - Desember 2026	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
4	Pengelolaan dan penanganan Pengaduan Masyarakat serta monitoring evaluasi Pengaduan Masyarakat	Semester II Ta 2025; Semester I Ta 2026	Unit kerja	1	1	1	4	20	1	Januari - Desember 2026	-
5	Pemantauan Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju Predikat WBK dan WBBM di Lingkungan BAPETEN Tahun 2026	Tahun 2026	Unit kerja	1	1	4	7	30	1	Januari - Desember 2026	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
6	Identifikasi Benturan Kepentingan dan monitoring evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan	Semester II Ta 2025; Semester I Ta 2026	Unit kerja	1	1	3	6	20	1	Januari - Desember 2026	-
7	Pelaksanaan SPI tahun 2026 dan pemantauan atas Hasil Survey Penilaian Integritas Tahun 2025 oleh KPK	Tahun 2026	Unit kerja	1	1	1	4	30	1	Triwulan II, III dan IV	-
8	Pemantauan dalam rangka	Tahun 2025	Unit kerja	1	1	2	5	30	1	Triwulan I	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Penilaian Kepatuhan P3DN										
V	MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA										
1	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2026 oleh Manajemen BAPETEN	Tahun 2026	Lembaga	1	1	4	7	30	1	Juli - Desember 2026	-
2	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2026	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	8	11	30	1	Februari - Desember 2026	-
3	Pendampingan terhadap pemeriksaan Eksternal	Tahun 2025	Lembaga	1	1	2	5	30	1	Januari - April 2026	-

No .	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
4	Penyusunan Laporan Tahunan Capaian Kinerja, Output dan Anggaran Inspektorat Tahun 2025	Tahun 2025	Inspektorat	1	1	1	4	20	1	Februari 2026	-
5	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Rencana Kinerja Tahunan, Pakta Integritas Tahun 2026, Tim Kerja Inspektorat	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	1	4	20	1	Triwulan I	

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Tahun 2026, Tim Penguatan Pengawasan Bapeten Tahun 2026										
6	Penyusunan Pedoman Pengawasan Internal (BK dan PBJ)	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	8	11	30	1	Januari - Desember 2026	-
7	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	8	11	30	1	Januari - Desember 2026	-
8	Bimbingan Teknis/Asistensi/ Pelatihan di	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	8	11	30	1	Januari - Desember 2026	-

No .	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Kantor Sendiri, Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders;										
9	Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Inspektorat	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	1	3	20	1	Januari - Desember 2026	-
10	Pengelolaan dan Penatausahaan Kinerja Inspektorat	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	1	3	20	1	Januari - Desember 2026	-
11	Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	1	3	20	1	Januari - Desember 2026	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Negara Inspektorat										
12	Pengelolaan dan Penatausahaan Naskah Dinas Inspektorat	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	1	3	20	1	Januari - Desember 2026	-
13	Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja serta Disiplin Kerja SDM Inspektorat	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	1	3	20	1	Januari - Desember 2026	-
14	Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Tahun 2025	Inspektorat	1	1	2	5	20	1	Triwulan II	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Inspektorat Tahun 2025										
15	Penyusunan PKPTBR Tahun 2027	Tahun 2027	Inspektorat	1	1	3	6	20	1	Desember 2026	-
16	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	8	11	30	1	Desember 2026	-
17	Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	8	11	30	1	Januari - Desember 2026	-

No	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari (kerja)	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan	Keterangan
	Inspektorat Tahun Anggaran 2026										
18	Manajemen Risiko Inspektorat	Tahun 2026	Inspektorat	1	1	8	11	30	1	Februari 2026	-

Tabel 2 Komponen Personil Tim PKPTBR Tahun 2026

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim
1	Audit atas Teknologi Informasi	Iwan	Saras, Nasrullah, Restu, Gorby, Ridwan, Anis, Tuti	Audit ketaatan atas belanja pegawai	Restu	Tuti, Iwan, Gorby	Audit ketaatan atas kegiatan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 4 dan 6 (3565.EBA.99 4.002.G)	Restu	Gorby, Ridwan

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
2	Audit ketaatan atas kegiatan Perawatan Gedung Kantor dan Sarana Gedung Kantor (3565.EBA.994.02.B dan C)	Tuti	Gorby, Anis, Iwan	Audit kinerja atas fungsi jaminan mutu ketenaganukliran	Tuti	Anis, Ridwan, Restu	Audit ketaatan atas kegiatan pengadaan peralatan dan mesin (RDMS, RPM, APD, AC)	Ridwan	Tuti, Restu, Iwan
3	Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputy Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputy Pengkajian Keselamatan Nuklir	Restu	Iwan, Anis, Gorby	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN TA. 2025	Tuti	Restu	Reviu RKA-K/L dan TOR/KAK serta RAB TA. 2027	Tuti	Saras, Henny, Restu, Ridwan, Iwan, Anis, Gorby
4	Reviu atas Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK Tahun Anggaran 2025 BAPETEN	Ridwan	Restu, Anis, Gorby	Reviu Revisi Anggaran	Restu	Ridwan, Gorby	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal	Ridwan	Tuti, Gorby

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
5	Reviu RKBMN TA. 2028	Iwan	Anis	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon I Tahun 2025 di lingkungan BAPETEN	Tuti	Ridwan, Anis, Gorby	Pemantauan Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju Predikat WBK dan WBBM di Lingkungan BAPETEN Tahun 2026	Iwan	Henny, Gorby, Anis, Ridwan
6	Reviu atas Pengelolaan PNBPN TA 2026	Restu	Ridwan, Tuti, Anis	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon II Tahun 2025 calon penerima predikat WBK/WBBM di lingkungan BAPETEN	Tuti	Ridwan, Anis, Gorby	Identifikasi Benturan Kepentingan dan monitoring evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan	Gorby	Restu, Iwan, Mia

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
7	Evaluasi Disiplin Belanja	Iwan	Anis, Gorby	Evaluasi Internal ex-ante dan On-going atas Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2026	Anis	Gorby	Pendampingan terhadap pemeriksaan Eksternal	Ridwan	Tuti, Gorby
8	Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan BAPETEN	Iwan	Gorby	Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Restu	Henny, Tuti, Nasrullah, Iwan, Ridwan, Anis, Gorby	Penyusunan Pedoman Pengawasan Internal (BK dan PBJ)	Tuti	Henny, Saras, Iwan, Restu, Ridwan, Anis, Gorby, Mia
9	Pengelolaan dan pengendalian Gratifikasi serta monitoring evaluasi Gratifikasi	Anis	Iwan	Evaluasi lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation/CEE) unit kerja tahun 2026	Restu	Tuti, Ridwan, Anis	Bimbingan Teknis/Asistensi/Pelatihan di Kantor Sendiri, Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders;	Anis	Henny, Saras, Iwan, Restu, Ridwan, Tuti, Gorby, Mia

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
10	Pengelolaan dan penanganan Pengaduan Masyarakat serta monitoring evaluasi Pengaduan Masyarakat	Anis	Iwan	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2026 oleh Manajemen BAPETEN	Restu	Tuti, Iwan, Gorby, Anis	Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Tahun 2025	Tuti	Rrestu, Ridwan
11	Pemantauan dalam rangka Penilaian Kepatuhan P3DN	Iwan	Anis, Gorby	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2026	Restu	Henny, Tuti, Nasrullah, Iwan, Ridwan, Anis, Gorby, Mia	Penyusunan PKPTBR Tahun 2027	Restu	Ridwan, Tuti, Mia
12	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal	Iwan	Saras, Tuti, Nasrullah, Restu Ridwan, Anis, Gorby, Mia	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Restu	Henny, Tuti, Nasrullah, Iwan, Ridwan, Anis, Gorby, Mia	Manajemen Risiko Inspektorat	Ridwan	Henny, Saras, Iwan, Restu Ridwan, Tuti, Gorby, Mia

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
13	Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Inspektorat Tahun Anggaran 2026	Gorby	Saras, Tuti, Nasrullah, Restu Ridwan, Anis, Gorby, Mia						